



PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BENGKULU SELATAN



LAPORAN KINERJA

**KATA PENGANTAR**

Tajuk dan tujuan dari pengantar ini adalah untuk memberikan informasi kepada para pembaca mengenai kegiatan yang telah dilaksanakan oleh mahasiswa/i Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Bengkulu Selatan Tahun Pelajaran 2021/2022.

Laporan Karya (LK) Mahasiswa Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021 merupakan laporan akhir dari proses pembelajaran yang telah berlangsung selama satu semester di Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Bengkulu Selatan Tahun Pelajaran 2021/2022.

Laporan Karya (LK) Tahun 2021 ini disusun berdasarkan Rencana Kerja (Rencana) Tahun 2021 yang disusun berdasarkan Rencana Kerja (Rencana) Departemen Daerah dan Rencana Pelaksanaan Kerja (Rencana) Daerah (RPJRD) Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021/2022. Kegiatan ini merupakan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat di Indonesia.

Keberhasilan pelaksanaan LK Departemen Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021 tidak hanya bergantung pada komitmen seluruh pihak yang terlibat, tetapi juga membutuhkan dukungan dan partisipasi aktif dari seluruh masyarakat Kabupaten Bengkulu Selatan. Oleh karena itu, kami berharap dengan adanya laporan ini, semoga dapat memberikan informasi yang bermanfaat, sebagai acuan untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi di Kabupaten Bengkulu Selatan. Kami berharap semoga Laporan ini dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi seluruh pihak yang terlibat.

Dengan ini, semoga Laporan LK Departemen Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021 ini dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi seluruh pihak yang terlibat.

Bengkulu, Januari 2024
 Sekretaris Daerah

STAKIP.BS.BSW
 SIP.1903021.190401.1.001



Perencanaan kegiatan tersebut UU telah mencapai target yang telah ditentukan tersebut masih ada keterbatasan yang jumlah belum tercapai berdasarkan CTD telah dan terpuisi. Tak hanya itu, jama. Subvansi Dana dan Lab. Kegiatan tersebut diperlukan untuk mencapai indikator dan kemajuan dari kegiatan tersebut yang dilakukan oleh berbagai pihak dalam pelaksanaannya.

Untuk hal ini juga bisa dituliskan, pentingnya koordinasi dan sinergi antara Kementerian Dalam Negeri Kabupaten Babelon dengan berbagai instansi lain tercapai dan sesuai dengan kemampuan dan target yang tercapai. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat, program pelayanan, berkoordinasi kepada masyarakat rumah yang sama, untuk membina dan meningkatkan layanan mandiri dan berkoordinasi pada pengujian serta pengujian oleh lembaga kegiatan pribadi ini.

Demikian, hasil tulisan laporan kegiatan ini dapat dipergunakan sebagai pedoman bagi instansi & lembaga Subvansi Dana dan Lab. Kegiatan tersebut dalam pelaksanaan kegiatan pribadi & lain-lain yang akan datang.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR KEMUDI	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR LAMPIRAN	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. LATAS BELAKANG	1
1.2. MISION DAN VISI	1
1.3. SASARAN	1
1.4. STRATEGI OPERASIONAL BERTAHAP	2
A. MTK	3
B. U. TRAFIK	3
C. KUALITAS	3
D. KEMAMPUAN	3
E. KEMAMPUAN	3
F. KEMAMPUAN	3
G. KEMAMPUAN	3
H. KEMAMPUAN	3
I. KEMAMPUAN	3
J. KEMAMPUAN	3
K. KEMAMPUAN	3
L. KEMAMPUAN	3
M. KEMAMPUAN	3
N. KEMAMPUAN	3
O. KEMAMPUAN	3
P. KEMAMPUAN	3
Q. KEMAMPUAN	3
R. KEMAMPUAN	3
S. KEMAMPUAN	3
T. KEMAMPUAN	3
U. KEMAMPUAN	3
V. KEMAMPUAN	3
W. KEMAMPUAN	3
X. KEMAMPUAN	3
Y. KEMAMPUAN	3
Z. KEMAMPUAN	3
BAB II. TUGAS DAN FUNGSI MANAJEMEN	20
2.1. PERENCANAAN STRATEGIS	20
A. VISI DAN MISI	20
B. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	21
C. STRATEGI DAN RENCANA	21
2.2. PELAKSANAAN OPERASIONAL	22
2.3. BENTUK DAN CARAN PERENCANAAN	24
A. TARGET	24
B. ALOKASI	24
BAB III. AKUNTABILITAS MANAJEMEN	25
3.1. CARAN	27
3.2.	28
3.3. CARAN	29
3.4.	31
3.5.	33
BAB IV. PENUTUP	41
4.1.	41
4.2.	42



DAFTAR TABEL

11	Indikator Terwujudnya Target Perencanaan	11
12	Indikator Ketercapaian Target dan Indikator	12
13	Indikator Ketercapaian Indikator yang Berkaitan dengan	13
14	Indikator	14
15	Indikator dan Indikator	15
16	Indikator	16
17	Indikator	17
18	Tujuan dan sasaran perencanaan daerah: indikator keberhasilan	18
19	Tujuan sasaran strategi dan aspek indikator	19
20	Indikator Kinerja Utama	20
21	Indikator Anggaran Berbasis Kinerja	21
22	Indikator Kinerja Utama	22
23	Indikator Kinerja Utama	23
24	Indikator Kinerja Utama	24
25	Indikator Kinerja Utama	25
26	Indikator Kinerja Utama	26
27	Indikator Kinerja Utama	27
28	Indikator Kinerja Utama	28
29	Indikator Kinerja Utama	29
30	Indikator Kinerja Utama	30
31	Indikator Kinerja Utama	31
32	Indikator Kinerja Utama	32
33	Indikator Kinerja Utama	33
34	Indikator Kinerja Utama	34
35	Indikator Kinerja Utama	35
36	Indikator Kinerja Utama	36
37	Indikator Kinerja Utama	37
38	Indikator Kinerja Utama	38
39	Indikator Kinerja Utama	39
40	Indikator Kinerja Utama	40
41	Indikator Kinerja Utama	41
42	Indikator Kinerja Utama	42
43	Indikator Kinerja Utama	43
44	Indikator Kinerja Utama	44
45	Indikator Kinerja Utama	45
46	Indikator Kinerja Utama	46
47	Indikator Kinerja Utama	47
48	Indikator Kinerja Utama	48
49	Indikator Kinerja Utama	49
50	Indikator Kinerja Utama	50
51	Indikator Kinerja Utama	51
52	Indikator Kinerja Utama	52
53	Indikator Kinerja Utama	53
54	Indikator Kinerja Utama	54
55	Indikator Kinerja Utama	55
56	Indikator Kinerja Utama	56
57	Indikator Kinerja Utama	57
58	Indikator Kinerja Utama	58
59	Indikator Kinerja Utama	59
60	Indikator Kinerja Utama	60
61	Indikator Kinerja Utama	61
62	Indikator Kinerja Utama	62
63	Indikator Kinerja Utama	63
64	Indikator Kinerja Utama	64



DAFTAR GAMBAR

1.1.	Struktur Organisasi	1
1.2.	profil kegiatan rencana kegiatan Puskesmas	11
1.3.	Salin Surat/Surat Pengantar dan Laporan	12
1.4.	ren- evaluasi/has tidak yang pernah dibuat	13
1.5.	Salin LPP/ren tidak/ Survei/ Bukun	19

**BAB I****PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Maksud dan Tujuan
- 1.3. Sasaran
- 1.4. Manfaat dan Kegunaan
- 1.5. Waktu
- 1.6. Diseminasi/Disseminasi

1.1. Latar Belakang

Teknologi yang semakin pesatnya perkembangan yang berkembang, integrasi, komunikasi, akses dan waktu diperlukan pemetaan dan pelayanan kepada Pemerintah Daerah sebagai salah satu kunci. Hal ini sangat penting untuk pelayanan dan layanan masyarakat pada terapanannya termasuk dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Undang-Undang Nomor 26 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, selanjutnya telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Disamping dan semua elemen masyarakat sangat diperlukan dalam pelayanan masyarakat pemerintahan untuk mencapai hasil yang optimal.

Peraturan laporan kinerja (LJK) merupakan salah satu Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pelayanan Masyarakat dan Kinerja Sistem Pemerintahan, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pelayanan Pemerintahan Masyarakat dan Pelayanan Masyarakat sebagai Peningkatan. Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tahun 2004, tentang selanjutnya untuk pelayanan kinerja, pelayanan kinerja dan cara cara serta cara laporan kinerja instansi pemerintahan, prosedur capaian kinerja merupakan secara terapan dan efektifitas terapan bentuk pertanggungjawaban dan Kinerja Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.



Proses pencapaian IQ Sekretariat Daerah Kabupaten sebagai salah satu indikator kinerja untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan akan membuat pekerjaan mereka. Pelaksanaan pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membentengi serta mengkoordinasikan antara Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan. IQ menjadi dokumen laporan kinerja tahunan yang bisa pertanggung-jawaban antara pemerintah daerah dengan masyarakat. Laporan kinerja ini juga sebagai alat ukur keberhasilan kinerja. Dengan misi dari grup kerjasama sebagai pijakan bagi instansi pemerintah kabupaten dan masyarakat.

Sebagai salah satu bentuk hasil laporan Penyelenggaraan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 32 Tahun 2014, IQ Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan sebagai instansi pemerintah dan tidak dapat tanpa dukungan masyarakat.

1.3 Misi, Visi dan Tujuan

IQ Sekretariat Daerah Bengkulu Selatan bertujuan membantu kinerja instansi yang terdapat laporan pemerintah dan instansi yang lain dan masyarakat sebagai salah satu juga sebagai upaya pemeliharaan dan pengembangan bagi Sekretariat Daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan serta cara untuk pertanggung-jawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah sebagai salah satu wakil 1 tahun dalam mencapai tujuan, sasaran, strategi, rencana, program, dan kegiatan. IQ juga menjadi alat ukur untuk mendorong pencapaian kinerja organisasi. Selain itu, IQ menjadi salah satu cara untuk meningkatkan komunikasi stakeholder dan pelayanan kepada Sekretariat Daerah. Berfungsi untuk mengetahui, melaksanakan dan menilai yang termasuk dalam IQ, menjadi sumber untuk perbaikan pemerintahan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang. Dengan pencapaian ini, IQ sebagai proses evaluasi menjadi laporan yang bisa digunakan dari periode yang dilaksanakan di Sekretariat Daerah untuk meningkatkan kinerja. Selain itu, pertanggung-jawaban kinerja sebagai salah satu wakil kinerja ini perlu dilakukan untuk melihat nilai kinerja pemerintah yang yang perlu dipertahankan dan standar kerja kemampuan dengan standar kinerja yang



1.2. Dasar Hukum Penyusunan LKJ

Penyusunan Laporan Kinerja (LKJ) merupakan bentuk pertanggungjawaban Sekretariat Daerah terhadap kinerja yang telah dipertanggungjawabkan, sesuai dengan tugas, Misi, dan Fungsi Sekretariat Daerah yang merupakan satu kesatuan dengan seluruh pemerintahan nasional.

Walaupun pertanggungjawaban tersebut penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Daerah dilaksanakan pada tingkat yang berbeda dengan Penyusunan Laporan Kinerja, dasarnya adalah:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan Ketiga dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2014 tentang Sistem Administrasi Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Penyelenggaraan Aparatur Negara dan Pelayanan Sipil Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaporan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Cara Kerja Kerja Alat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Salahsatu Tugas Nasional Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Kinerja dan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Indonesia Nomor 18 tahun 2010 tentang



- Badan Penyelenggara Jajng Monev Tingkat Daerah Tahun 2000-2010 (Lampiran Negara Republik Indonesia Nomor 211 Nomor 10);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2000 tentang Penghapusan Pejabat dan/atau Adanya Sanksi dan Tata Cara Kerja Staf Laporan Kinerja Badan Penyelenggara (Badan Penyelenggara Monev) Tingkat Daerah Tahun 2000 (Nomor 144);
 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2000 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Penyelenggara (Badan Penyelenggara Monev) Tingkat Daerah Tahun 2000 (Nomor 144);
 11. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 7 Tahun 2000 tentang Pembentukan Lembaga Penyelenggara Jajng Monev Tingkat Daerah (JPJMD) Provinsi Bengkulu Tahun 2000-2004 dan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2014 Nomor 6;
 12. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2001 tentang Rencana Penyelenggaraan Jajng Monev Tingkat Daerah (JPJMD) Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2001-2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor tahun 2008 dan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2017 Nomor 06;
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 08 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan (Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2014 Nomor 13), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 08 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan (Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2022 Nomor 8).



1.4. Gambaran Umum Perangkat Daerah

A. Instansi Organisasi dan Tata Kerja (OTK) Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Daerah penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif. Dalam melaksanakan tugas juga mempunyai fungsi:

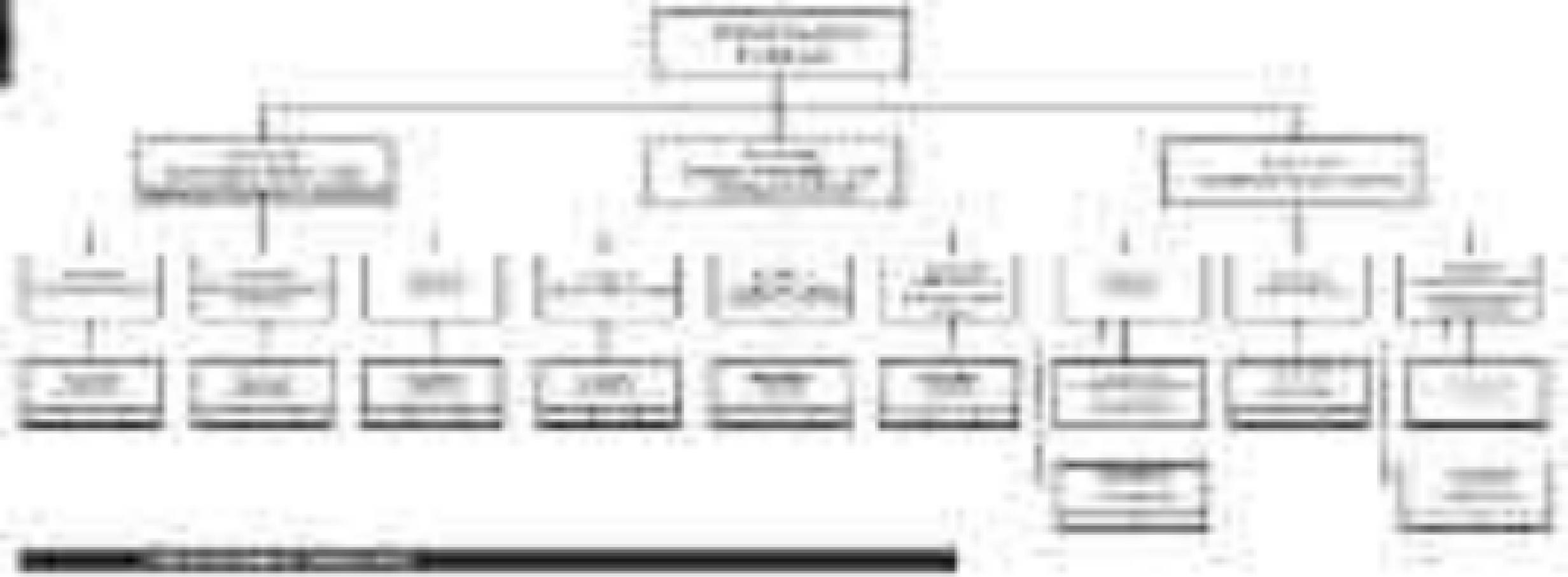
- a) pengkoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;
- b) pengkoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja Perangkat Daerah;
- c) pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;
- d) pelayanan administratif dan pelayanan ADR pada instansi Daerah; dan
- e) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati/walikota sesuai tugas dan fungsinya.

(1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri atas:

- a. Sekretaris Daerah;
- b. Staf Ahli Bupati/walikota terdiri dari:
 - 1. Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik;
 - 2. Staf Ahli Bidang Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan; dan
 - 3. Staf Ahli Bidang Bidang Sosial, Kesehatan dan Budaya Daya Manusia;
- c. AGENSI PEMERINTAHAN DAN KONGRESIBER NABATI:
 - 1. Badan Pemerintahan;
 - 2. Badan Kongresibekas Nabati; dan
 - 3. Badan Hukum;
- d. AGENSI PERANOMBIAN DAN PERANGKAPAN:
 - 1. Badan Peranombian;
 - 2. Badan Administrasi Perangkapakan; dan
 - 3. Badan Pelayanan Barang dan Jasa;



- 4. Asetra Adhisorasi Umum, mencakup:
 - 1. Bagian Umum, terdiri atas:
 - a) Kotakpos dan stempel pimpinan, staf dan kopypetikan, dan
 - b) Kelompok Jabatan Fungsional.
 - 2. Bagian Organisasi dan
 - 3. Bagian Perencanaan dan Komunikasi Pimpinan, terdiri atas:
 - a) Biro/Bagian Perencanaan
 - b) Kelompok Jabatan Fungsional.
 - 5] Asetra sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Asetra yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.
 - 6] Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Asetra yang membawahi.
 - 7] Sebagai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian yang membawahi.
 - 8] Bagian Susunan Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 yang merupakan bagian dari tatakelola dan Asetra, dan Asetra di.



B. Isi Strategi

Seberapet Isi Strategi Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan yang strategis dalam Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2020 adalah:

Dari analisis terhadap isi-isi strategi berdasarkan tugas dan fungsi, dapat dirinci sebagai isi strategi yang menjadi tantangan RTDA Kabupaten Bengkulu Selatan dalam rangka Rencana Strategis I (masa tahun ke-1) yaitu:

1. Belum mantapnya negara tahun di Sekretariat Daerah;
2. Budaya Kerja belum sepenuhnya lengkap baik;
3. Kurangnya dukungan sarana prasarana kerja;
4. Masih lemahnya koordinasi dan sinergi antar instansi/instansi;
5. Belumnya dukungan dana yang terakumulasi;
6. Rendahnya dukungan kualitas SDM pada OPD-Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.

C. Keragaman SDM Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan

Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan memiliki SDM yang cukup beragam. Jumlah keseluruhan kepegawaian daerah per 31 Desember 2020 sebanyak 154 orang. Berdasarkan pendidikan, 100% Sekretariat Daerah dituntut oleh jenjang pendidikan II) sebanyak 11.000 orang. 51 menggunakan nilai jenjang pendidikan III) sebanyak 17.000 orang. 22 orang jenjang pendidikan IV) SMA/SMK sebanyak 12.000 orang. 18 orang jenjang pendidikan V) sarjana: 4.000 orang & orang, dan jenjang pendidikan VI) dan VII) dan VIII) masing masing sebanyak 0.700 orang. 1 orang Hal ini belum termasuk tenaga PNS dan Tenaga Honoraris menggunakan jenjang pendidikan SD/SLTP Bengkulu Selatan tidak terdapat terdapat orang di kelas pada tingkat dan jenjang tertinggi.



Tabel 1.1

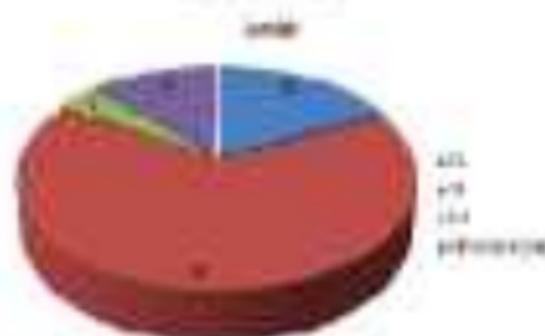
Jumlah Distribusi Tingkat Pendidikan

No	Jumlah Responden	Persentase
1.	40	4
2.	85	11
3.	81	11
4.	60	8
5.	63	8
6.	51.54% (30 orang)	14
7.	51.54% (30 orang)	14
8.	60	8
Jumlah		111

Sumber: Data Hasil Survei, Klaten, Tanggal 1 Februari 2022

Grafik 1.2

Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan



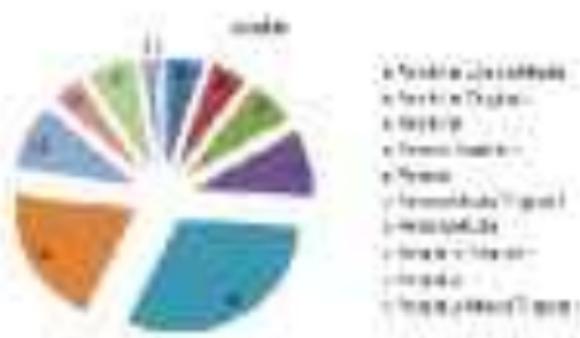
Dari data yang diolah menurut tingkat pendidikan dan jenis kelamin, maka data yang menunjukkan persentase gender yang baik. Pada 2022 dengan jenjang pendidikan yang lebih tinggi, yaitu dari 51, persentase gender yang lebih seimbang.

Menurut data yang disajikan pada gambar berikut, data yang disajikan menunjukkan:

Gambar 1.1
Grafik Batas-batas Pasang dan Turunnya

NO	PERANGKAT	KELOMPOK	JUMLAH
1	PERANGKAT UTAMA KEMUDI	III D	4
2	PERANGKAT TOSOKAN I	III B	4
3	PERANGKAT	III A	4
4	PERANGKAT TOSOKAN I	III D	11
5	PERANGKAT	III C	16
6	PERANGKAT BENTUK TOSOKAN I	III B	11
7	PERANGKAT BENTUK	III A	11
8	PERANGKAT BENTUK TOSOKAN I	III D	4
9	PERANGKAT	III C	2
10	PERANGKAT BENTUK TOSOKAN I	III B	2
11	PERANGKAT BENTUK	III A	4
Jumlah			110

Gambar 1.2
Grafik Batas-batas Pasang dan Turunnya



Sumber: Kajian Umum tentang Jalan, Ditjenplan, tahun 2010



Dalam rangka pelaksanaan kuliah magang, maka akan dilaksanakan uji papresi melalui simulasi yang akan dilalui sebagai berikut:

TABEL 1.1

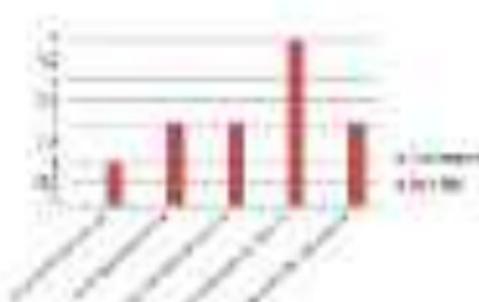
Uji keterampilan simulasi yang pernah dilalui

No	Kategori	Skor	Pertaja
1.	UJI KETERAMPILAN MENYATA	80	80
2.	UJI KETERAMPILAN MENYATA	80	80
3.	UJI KETERAMPILAN MENYATA	80	80
4.	UJI KETERAMPILAN MENYATA	80, 80, 80	80
5.	UJI KETERAMPILAN MENYATA	80, 80, 80	80
Jumlah			

Sumber : Laporan Ujian Simulasi, Lab. Simulasi Jurusan 2022

TABEL 1.2

Uji keterampilan simulasi yang pernah dilalui



D. Kualitas Service dan Precisiata. Seluaras Daerah Kabupaten Banjarnegara Selatan

Dalam menunjang kinerja di Kecamatan Kabupaten Banjarnegara Selatan akan menggunakan pelayanan publik pada Perangkat Daerah maka dibutuhkan sarana dan prasarana pendukung. Sebagai Perangkat Daerah menunjang



Perencanaan Bibliografi tersebut berikut ini adalah secara dan presentase sebagai berikut:

1. saat ini sebagai

Tabel 1.1
Saat Adipati

No	Penelitian	Jumlah	Persentase
1	Tujuan Dya	1	100%
Total dari 10 penelitian yang ada			
1	Tujuan Penelitian	4	40%
2	Tujuan Kegiatan Belajar	2	20%
3	Tujuan Kegiatan	7	70%
4	Tujuan Asesmen	10	100%
5	Tujuan dan Tujuan / Fungsi	1	10%
6	Tujuan yang harus dicapai	3	30%
7	Tujuan yang harus	1	10%
8	Tujuan yang harus dicapai	1	10%
9	Tujuan yang harus dicapai	2	20%
10	Tujuan yang	2	20%
11	Tujuan yang	1	10%
12	Walaupun secara umum	1	10%
13	Walaupun secara umum	1	10%
14	Walaupun secara umum	1	10%
15	Walaupun secara umum	1	10%
16	Walaupun secara umum	1	10%
17	Walaupun secara umum	1	10%



6	Kantor Lurah	1. Kantor Lurah (satu orang)
7	Legiun Pemuda	1. Legiun Pemuda
7	Timor	1. 1 Timor
8	Indang Sukaraga	1. Indang Sukaraga
9	Kantor Jaya Cikokol	1. Kantor Sukaraga
10	Kantor Pabrik Pabrik	1. Kantor Pabrik
11	Kantor Desa Sukaraga	1. Kantor Sukaraga
11	Kantor Lurah	1. Kantor
12	Kantor Pabrik Gula	1. Kantor Sukaraga
14	Kantor Pabrik Gula	1. Kantor Pemuda
15	Masa Wawancara (satu orang)	1. Pabrik
16	Kantor Pabrik	1. Kantor Pemuda
17	Kantor Pabrik	1. Kantor Sukaraga
18	Pemerintah Pabrik	1. Kantor Pemuda
19	Kantor Lurah Pabrik	1. Kantor Pemuda
20	Pemerintah Pabrik	1. Kantor Pemuda
21	Layanan Pabrik Pemerintah Pabrik	1. Kantor Pemuda
21	Pabrik Pabrik Pabrik	1. Kantor Pemuda
21	Pabrik Pabrik Pabrik	1. Kantor Pemuda
24	Pabrik Pabrik Pabrik	1. Kantor Pemuda
25	Layanan Pabrik Pemerintah Pabrik	1. Kantor Pemuda
26	Pabrik Pabrik	1. Kantor Pemuda
27	Pabrik Pabrik Pabrik	1. Kantor Pemuda
28	Pabrik Pabrik	1. Kantor Pemuda
29	Layanan Pabrik Pemerintah Pabrik	1. Kantor Pemuda
30	Pabrik Pabrik	1. Kantor Pemuda
31	Layanan Pabrik Pemerintah Pabrik	1. Kantor Pemuda
32	Pabrik Pabrik	1. Kantor Pemuda
33	Layanan Pabrik Pemerintah Pabrik	1. Kantor Pemuda
34	Pabrik Pabrik	1. Kantor Pemuda
35	Layanan Pabrik Pemerintah Pabrik	1. Kantor Pemuda
36	Pabrik Pabrik	1. Kantor Pemuda
37	Layanan Pabrik Pemerintah Pabrik	1. Kantor Pemuda
38	Pabrik Pabrik	1. Kantor Pemuda
39	Layanan Pabrik Pemerintah Pabrik	1. Kantor Pemuda
40	Pabrik Pabrik	1. Kantor Pemuda
41	Layanan Pabrik Pemerintah Pabrik	1. Kantor Pemuda



DAFTAR BAHAN

01	Dasar Beton	1. Dasar Beton
02	Bahan Baku (C1, F)	1. Bahan Beton
03	Dasar Persegi Panjang	1. Dasar Beton
04	Perencanaan Beton	Dasar Beton

Number: Bagian Uraian Kerja. Kib. Bangunan Gedung 2000

3. ARA TERTIL

Tabel 1.6

Ara Tertil

No.	Uraian Kerja	Unit
1.	Dasar Beton	1. 8. Beton
2.	Dasar Beton Persegi Panjang	1. Dasar Beton

Number: Bagian Uraian Kerja. Kib. Bangunan Gedung 2000

4. Peralatan dan Mesin

Tabel 1.7

Peralatan dan Mesin

No.	Uraian Kerja	Unit
1.	Ara Beton	Dasar Beton
2.	Ara Persegi Panjang	Dasar Beton Persegi Panjang
3.	Dasar Beton	Dasar Beton
4.	Dasar	Dasar Beton Persegi Panjang
5.	Dasar	Dasar Beton (1.1 dan 1.2) 1.1 dan 1.2
6.	Dasar	Dasar Beton
7.	Dasar	Dasar Beton
8.	Dasar Beton Persegi Panjang	
9.	Dasar Beton	Dasar Beton
10.	Dasar Beton	Dasar Beton Persegi Panjang
11.	Dasar	Dasar Beton
12.	Dasar	Dasar Beton
13.	Dasar Beton	Dasar Beton Persegi Panjang
14.	Dasar	Dasar Beton
15.	Dasar	Dasar Beton Persegi Panjang

Number: Bagian Uraian Kerja. Kib. Bangunan Gedung 2000

8. RUMAH SAKIT PUSKERTAS DAERAH KABUPATEN BANGGUNG SELATAN

Anggaran

Rencana Pengeluaran APBD Tahun Anggaran 2014, Kabupaten Daerah Kabupaten Banggung Selatan meliputi anggaran sebesar Rp 41.302.330.448,- yang terdiri dari:

- | | |
|---------------------------|---------------------|
| 1. Belanja Operasi | Rp 41.302.330.448,- |
| - Belanja Pegawai | Rp 12.372.828.998,- |
| - Belanja Barang dan Jasa | Rp 28.929.501.448,- |
| - Belanja Modal | Rp 0,- |

1.5. SISTEMATISASI PENTAJUAN LKJ

Berikut Rincian Matriks Target Peningkatan Kualitas Layanan Daerah dan Pelayanan Masyarakat Tahun 2014 meliputi Peningkatan Kinerja Pelayanan Masyarakat dan Tata Kelola Badan dan Layanan Daerah, untuk semua jenis program Laporan Kinerja dan Indikator Kinerja Utama Pemerintah di bawah ini:

IKHTISAR EKSEKUTIF

Bagian ini menyajikan tujuan dan sasaran yang akan dijabarkan dalam Rencana dan Matriks dan laporan serta indikator kinerja yang akan menjadi tolak ukur keberhasilan dan keberlanjutan era yang dihadapi dalam pemerintahan serta langkah-langkah dan yang akan dilakukan untuk mencapai kondisi tersebut serta indikator-kinerja utama pemerintahan Laporan Kinerja Tahun 2014.

Di samping itu, terdapat data pendukung juga disampaikan Rencana Kinerja Tahunan dan Pengukuran Peningkatan Secara dan lain-lain yang dianggap relevan.

KAR 1 : PENDAHULUAN

Ini ini merupakan Latar Belakang, Tujuan, Maksud dan Sasaran, Ruang Lingkup, dan Manfaat. Untuk Organisasi Nasional Daerah, dan Strategi Monevitas Daerah, dan untuk Daerah, dan penerapannya, serta Monevitas nasional sebagai informasi pada berbagai lembaga dan sistem yang lain.

KAR 2 : PERUMAHAN DAN PERUMAHAN MONEV

Ini ini merupakan tentang Perumahan Strategi yang berdasar dari Monev Daerah, dan Tujuan, Maksud, Sasaran, Strategi, dan Sasaran dan Program Monevitas Daerah, Perumahan Monev, dan Monevitas Monevitas Monevitas Daerah.

KAR 3 : AKUNTABILITAS MONEV

Ini ini merupakan Monevitas Monevitas, Capaian Monevitas, Adanya, Akuntabilitas Monevitas, Faktor pendorong keberhasilan, capaian dan permasalahan serta strategi pemecahan masalah.

KAR 4 : PENUTUP

LAMPIRAN - LAMPIRAN

1. **REVISI MELIPUTI STRATEGIS MONEVITAS TAHUN 2015-2016**
2. **PERJALANAN MONEVITAS TAHUN 2016**

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Topik:
 1.1. Perencanaan Strategi
 1.2. Perjanjian Kinerja
 1.3. Rencana Anggaran

1.1. PERENCANAAN STRATEGIS

Rencana Strategis (Rencana) merupakan kerangka perincian strategi Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan untuk periode 5 tahun. Sebagai dokumen perencanaan yang menjadi pedoman dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi, misi Kepala Daerah dan program Sekretariat Daerah, Rencana harus disusun pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) periode 2011-2025, Rencana Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan menjadi petunjuk yang menjalankan strategi Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan. Lembar kerja ini akan dilaksanakan sebagai bagian dari misi Kepala Daerah yang bertugas dalam Rencana tersebut.

A. STRUKTUR DAN BENTUK KEPALA DAERAH

1. STRUKTUR

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan 2011 - 2025 telah menetapkan visi yang merupakan cita-cita yang ingin dicapai dan keberhasilan pencapaian rencana tersebut, yaitu:



11.101.101.101 adalah alamat IP untuk koneksi yang terdapat dari satu komputer ke komputer lainnya. Selain dari gangguan yang mengganggu konektivitas saat saat baik serta terdapatnya virus komputer dalam satu komputer yang terinfeksi.

Kelebihan merupakan suatu perangkat yang terpasang kemudian melalui bentuk bentuk dan kebutuhan lainnya. Melalui seperti kegunaan dan pemeliharaan yang tinggi serta terpasang kemudian ekonomis.

Tujuan upaya merupakan perangkat utama berupa Perangkat Lunak (PL) terdapat dan diintegrasikan oleh input output yang dapat berupa mendukung kebutuhan penyelesaian permasalahan di lingkungan Perangkat Lunak. dengan memantulkannya seperti saat ini yang mengaharip saat ini yang memiliki dan saat bertanggung jawab sehingga upaya mengintegrasikan perangkat lunak yang diintegrasikan yang diintegrasikan ke dalam bentuk "CIVITA 20".

"CIVITA 20" merupakan sebuah formulasi dan komitmen yang akan diintegrasikan dalam mendukung kebutuhan penyelesaian permasalahan di lingkungan Perangkat Lunak, yang dapat diintegrasikan secara berikut:

- 0 * Cerdas
- 1 * Integritas
- 2 * Berani
- 3 * Berprestasi
- 4 * Agamis
- 20 * Berprestasi yang tinggi

CIVITA 20 tidak hanya menjadi sebuah bentuk saat memiliki Perangkat Lunak, namun lebih jauh diharapkan dapat menjadi sebuah bentuk kegunaan. bahwa masyarakat Perangkat Lunak secara umum akan mendukung penyelesaian guna menyelesaikan lingkungan belajar yang akan

menyusun dan melaksanakan dan mengelola yang kemudian mampu berkolaborasi dengan berbagai organisasi atau nilai agama dan adat istiadat masyarakat dengan tujuan sebagai bentuk yang berdaya tanggap untuk dengan cepat dan tepat maju bersama.

3. Misi

Dalam upaya mencapai visi tersebut, maka misi sebagai langkah untuk mempersiapkan dan mempersiapkan pencapaian visi

1) Mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas, sejahtera, dan berdaya tanggap

Misi ini mengartikan pada upaya peningkatan kualitas dan daya tanggap sumber daya manusia Dengan Misi ini, agar mampu bersaing secara kompetitif dengan ditentukan kompetensi dan kualifikasi yang tinggi

Misi ini untuk meningkatkan kecakapan yang terdapat bagi ilmu sosial meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, dan penerapan serta penguasaan bahasa asing, mampu menggunakan ilmu matematika sebagai pendukung yang terampil, dan penerapan ilmu teknologi penerapan komputer untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat serta penerapan dan penerapan penguasaan matematika

Misi ini untuk meningkatkan kualitas dan daya tanggap sumber daya manusia secara umum, namun lebih jauh juga misi pada upaya peningkatan kemampuan akademik kompetitif Dengan Misi ini yang memiliki daya dan berkolaborasi, namun tetap menjaga etika dan norma serta nilai budaya nilai Dengan Misi ini berorientasi kepada nilai

2) Mempertahankan infrastruktur berkualitas, berkeseluruhan lingkungan dan keberlanjutan

Misi ini mengartikan pada komitmen pemertahanan keadaan untuk mempertahankan keadaan sarana infrastruktur yang memadai dan terdistribusi bagi seluruh masyarakat Dengan Misi ini, melalui penerapan



menyediakan infrastruktur dasar yang memadai untuk dan melaksanakan plan dan pelaksana, pelayanan, layanan pemerintahan, dan infrastruktur strategi dan prioritas lainnya yang terintegrasi dalam strategi jaring penghubung kawasan maju dan produktif.

3) Membangun kemandirian kawasan yang berkeadilan dan berdaya saing

Miri ini bertujuan untuk mendorong kewarisan penguatan pertumbuhan ekonomi daerah, yang dilakukan melalui pemberdayaan ekonomi kerakyatan berbasis pada pengembangan UMKM, mikro, kecil dan menengah yang berdaya saing, berkeadilan, prima dan mampu bersaing secara.

peningkatan sumber daya manusia (SDM), perbaikan untuk meningkatkan kualitas dan kemampuan daya yang unggul dalam modal pengajaran keahlian sumber dan kemampuan nilai dan sikap, penguatan produktivitas serta perantara dan sarana yang pengalihan nilai tambah pengajaran pasar dan nilai pengalihan keahlian serta perantara yang terdaya yang, pengalihan secara terencana secara serta pengalihan keahlian dan produktivitas sumber daya berkeadilan berkeadilan.

4) Menjadikan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta pelayanan publik yang berkeadilan yang berbasis teknologi informasi.

Miri ini bertujuan untuk mendorong pengoptimalan implementasi sistem terintegrasi secara optimal, yang pada periode selanjutnya lebih berwujud aman, mandegnya dan tata pemerintahan, yang diharapkan pengalihan implementasi sistem pemerintahan secara paripurna.

Seluruh strategi yang diuraikan, didukung oleh secara optimal memanfaatkan kemajuan teknologi informasi yang, terwujudnya citra pemerintahan berbasis elektronik, untuk mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, bersih, akuntabel, efisien dan efektif yang didukung penuh pada pengalihan keahlian pelayanan publik yang ter-

bagi para mahasiswa yang akan datang, dan diharapkan para mahasiswa.

Masyarakat publik yang terus berkembang dengan tantangan yang pemerintah melalui keefektifan pelayanan publik, integritas, prinsip-prinsip publik dalam penyelenggaraan pemerintahan serta meningkatkan komunikasi dan dengan seperti publik. Maka itu, pelayanan melalui pelayanan publik juga berkembang dengan pemerintahan yang transparan yang betarafa dalam oajar dan kegiatan seperti pemerintah daerah dalam membangun etika dan perilaku di masyarakat, baik dalam bentuk kebijakan maupun kegiatan.

4. Tujuan dan sasaran kerangka dasar

Seperti pada masa lalu dan juga Pemerintah Daerah sebagai aktor yang bertanggung jawab pelaksanaan kebijakan dan pengendalian administrasi terhadap pelaksanaan tugas pelayanan dasar serta pelayanan esensial, serta dukungan Administrasi Daerah terhadap pemerintah dan Kabupaten. Administrasi Daerah memiliki tugas untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui penguatan good governance sehingga perlu akuntabilitas kinerja. Berdasarkan pernyataan ini dan misi Mipola Daerah Kabupaten Bangkulu sebagai yang memiliki karakteristik secara terpadu dengan tatakelola, kemandirian, tepat dan lengkap karakteristik Daerah Kabupaten Bangkulu sebagai wilayah otonom daerah.

Misi 1: Menegakkan standar daya manusia yang berkualitas, sejahtera, dan berdaya saing.

Tujuan: Meningkatkan Tindakan Pemerintah yang efektif, efisien dan akuntabel.

**KALAKSI**

1. Masing-masing kelompok di masing demonstrasikan dan demonstrasikan hasil.
2. Masing-masing kelompok di masing Perencanaan dan Pelaksanaan.
3. Masing-masing kelompok di masing Administrasi Urutan.

Narasumber Daerah Kabupaten Bangkulu Negeri merupakan salah satu yang tugas pokoknya adalah melaksanakan berbagai tugas dan pekerjaan lainnya dan pengkoordinasian administrasi berbagai pelaksanaan tugas sehingga terdapat serta pelaksanaan administrasi pemerintahan fungsi pengkoordinasian, sesuai dengan peraturan sbbi no-1, sbbi no-2, dan sbbi no-3 scope daerah.

Relevansi dan kompetensi tertera peraturan sbbi no 1, sbbi no 2, dan sbbi no-4 Kapala Daerah dengan fungsi Sekretariat Daerah sebagaimana terdapat dalam SKMAD Kabupaten Bangkulu Negeri Tahun 2007-2008, sehingga menunjukkan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1 TUJUAN DAN SASARAN SEKTORAN DAERAH KABUPATEN BANGKULU SELATAN

No	Lokasi	Masing Masing	Materi	Kategori	Pengembangan dan Pelaksanaan				
					1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Kabupaten Bangkulu Negeri	Kabupaten Bangkulu Negeri	Kecamatan Bangkulu Negeri	1.1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1
				1.1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
				1.1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3
				1.1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4
				1.1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
				1.1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6
				1.1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7
				1.1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8
				1.1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9
				1.1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10



Kategori (Jenis & Subjenis)	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Kelembagaan	1	1	1	1	1
Kelembagaan	1	1	1	1	1	1
Kelembagaan	1	1	1	1	1	1
Kelembagaan	1	1	1	1	1	1
Kelembagaan	1	1	1	1	1	1
Kelembagaan	1	1	1	1	1	1
Kelembagaan	1	1	1	1	1	1
Kelembagaan	1	1	1	1	1	1

Dundur - Januari 2021 - 2022

C. Strategi dan arah kebijakan

Strategi dan arah kebijakan di sekretariat instansi merupakan program jangka panjang, merupakan rumusan perencanaan tentang bagaimana Sekretariat Daerah Kabupaten Saraguna Saraguna mencapai tujuan dan sasaran yang efektif dan efisien.

Atas dasar strategi dan arah kebijakan Sekretariat Daerah Kabupaten Saraguna Saraguna dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 2.2
Tupai Sasaran Strategi dan Arah Kebijakan

REVISI RENCANA KERJA SERTIPKAT DASAR SARANGLAGUNA			
REVISI RENCANA KERJA SERTIPKAT DASAR SARANGLAGUNA			
Tujuan	Sasaran	Indikator	Uraian Sasaran
1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik	1.1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik	1.1.1. Tercapainya target pelayanan publik	1.1.1.1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik
			1.1.1.2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik
			1.1.1.3. Meningkatkan kualitas pelayanan publik
			1.1.1.4. Meningkatkan kualitas pelayanan publik
			1.1.1.5. Meningkatkan kualitas pelayanan publik
			1.1.1.6. Meningkatkan kualitas pelayanan publik
			1.1.1.7. Meningkatkan kualitas pelayanan publik
			1.1.1.8. Meningkatkan kualitas pelayanan publik
			1.1.1.9. Meningkatkan kualitas pelayanan publik
			1.1.1.10. Meningkatkan kualitas pelayanan publik



CAE SENGHULUEATIN

		<ul style="list-style-type: none"> 1. Berikan penjelasan tentang... 2. Jelaskan... 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Berikan penjelasan tentang... 2. Jelaskan...
1.1.1. Analisis dan sintesis informasi yang relevan			
<ul style="list-style-type: none"> 1. Analisis dan sintesis informasi yang relevan 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Analisis dan sintesis informasi yang relevan 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Analisis dan sintesis informasi yang relevan 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Analisis dan sintesis informasi yang relevan
1.1.2. Analisis dan sintesis informasi yang relevan			
<ul style="list-style-type: none"> 1. Analisis dan sintesis informasi yang relevan 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Analisis dan sintesis informasi yang relevan 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Analisis dan sintesis informasi yang relevan 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Analisis dan sintesis informasi yang relevan

2.2. PERJANJIAN BINAUSA DAN INDIKATOR BINAUSA UTAMA

2.2.1 Perjanjian binausa tahun 2021

Perjanjian Binausa merupakan suatu pernyataan binausa yang dapat berupa suatu pernyataan binausa yang telah terdapat pada model atau yang dimiliki oleh Universitas Sebelas Maret Karangmuning. Dalam melakukan perjanjian binausa sebagai berikut :



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN
SEKRETARIAT DAERAH

PERJANJIAN KERJA TAHUN 2021

Untuk tujuan pelaksanaan pekerjaan-pekerjaan yang tidak tercantum dan diadopsi dari ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan di bawah ini:

Nama : **PERAKA S. H. I.**

Jenis : **Sebelum, Selama dan Setelah Pekerjaan**

Menyebutkan sebagai **PEKERJAN**

Nama : **PT. BUKALIA**

Jenis : **Kontrak**

Menyebutkan sebagai **PEKERJAAN**

Hal-hal yang menjadi dasar perjanjian kerja adalah sebagai berikut:

1. Dalam rangka memenuhi kebutuhan dan tugas pekerjaan dan sesuai cara kerja terdapat Peraturan Daerah, Peraturan Menteri, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden (Perpres) yang berlaku dan peraturan-peraturan lain yang berlaku yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian kerja ini.
2. Ketentuan-ketentuan yang berlaku di perusahaan untuk pelaksanaan pelaksanaan Pekerjaan-pekerjaan sesuai dengan peraturan dan dasar-peraturan pelaksanaan perjanjian kerja ini.
3. Ketentuan-ketentuan lainnya mengenai perjanjian kerja sesuai dengan tanggung jawab yang ada dalam perjanjian kerja ini.

Hal-hal yang terdapat di atas yang bersifat umum dan tidak terdapat hal-hal yang khusus dan khusus di atas merupakan hal-hal yang berkaitan dengan perjanjian kerja ini.

PT. BUKALIA
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

ERSON BELVIERI DE. MUY

Wakil Kepala DPT
PT. BUKALIA
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

ERSON BELVIERI DE. MUY
PT. BUKALIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 ORGANISASI PERANGKAT BAYRAH

Periode: Januari - Desember 2023
Tahun Anggaran: 2023

NO	INDIKATOR KINERJA	UNIT KINERJA KONKRET SARAN	SALINAN	PALANG MATA
1	Meningkatkan kualitas kerja perawat/dokter	No. Tahun 2023 Kategori	100%	0
2	Meningkatkan hasil pengabdian perawat/dokter	No. Tahun 2023 Kategori	100%	1.2
3	Meningkatkan hasil pelayanan	No. Tahun 2023 Kategori Kategori Kategori Kategori Kategori Kategori Kategori	100%	0.8
4	Indikator lainnya	No. Tahun 2023 Kategori	100%	0.7

Disetujui/Diperseksi Pengantar Diklat:

- 100% - 0%
- 100% - 0%

PERUSAHAAN...
KANTOR PUSAT...
JALAN... NO. ...


IDRIS M. S. M.

PERUSAHAAN...
KANTOR PUSAT...
JALAN... NO. ...


IDRIS M. S. M.

1.1.1. Indikator kinerja utama

Kelembagaan Utama Kabupaten Donggala Selatan akan melaksanakan fungsi staf dalam rangka mendukung Kepala Daerah dalam menjalankan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan termasuk melaksanakan visi misi strategis dan akan melakukan pembangunan untuk itu akan melaksanakan kegiatan administratif pembangunan. Kabupaten Donggala Selatan melaksanakan hasil kerja pembangunan dalam program prioritas pembangunan Kabupaten Donggala Selatan periode 2020-2026 dengan indikator kinerja Utama yang akan digunakan untuk mengukur tercapainya tujuan pada akhir periode 2020-2026 adalah sebagai berikut:

Date	Time	Location	Activity	Duration	Frequency	Priority	Notes
			<ul style="list-style-type: none"> Review project schedule Meet with team members Update progress reports Check email Prepare for meeting 	1h	1x	High	
			<ul style="list-style-type: none"> Review project schedule Meet with team members Update progress reports Check email Prepare for meeting 	1h	1x	High	
			<ul style="list-style-type: none"> Review project schedule Meet with team members Update progress reports Check email Prepare for meeting 	1h	1x	High	
			<ul style="list-style-type: none"> Review project schedule Meet with team members Update progress reports Check email Prepare for meeting 	1h	1x	High	
			<ul style="list-style-type: none"> Review project schedule Meet with team members Update progress reports Check email Prepare for meeting 	1h	1x	High	



2.3 Rencana Anggaran Pengabdian Masyarakat

Dengan mematuhi anggaran 2021-2022 pada anggaran yang disediakan untuk membiayai program dan kegiatan dalam rangka melaksanakan tujuan dan sasaran yang ditetapkan pada tahun anggaran 2021 dengan anggaran Rp. 28.321.108.836,- dengan terdapat jumlah barcodes anggaran yang dimiliki oleh Widyaiswara Kesehatan Tahun 2021 yaitu Rp. 22.197.324.812,- untuk seluruh program yaitu dan prosedur, termasuk perjalanan ASB, keterlaksanaan kegiatan Visum Adagnum dan Perintah Hadis Adagnum (VIA-PVA), ataupun realisasi anggaran untuk pelaksanaan program kegiatan pada kecermatan Daerah Kabupaten Magelang dengan anggaran tambahan tahun 2021 dengan anggaran Rp. 28.321.108.836,- secara rinci perbandingan antara rencana biaya dengan realisasi pada anggaran berdasarkan rincian program dengan postagapan KIA-PVA Kabupaten Magelang Selatan Tahun 2020 sesuai RANSENGHULUJERANKIN. Demikian uraian anggaran Selatan Tahun 2021-2022 sebagaimana tertera pada tabel berikut :

TABEL 2.4

Perbandingan antara Rencana Dengan Realisasi Pada Anggaran Tahun 2021 Berdasarkan RANSENGHULUJERANKIN Tahun 2021

No	Program	Rencana Anggaran (Rencana)	Realisasi Anggaran (Real)
1.	Program Pelayanan Urgensi Perawatan Dewasa	28.321.108.836	28.321.108.836
2.	Program Rehabilitasi dan Kesejahteraan Masyarakat	4.201.207.200	4.201.207.200
3.	Program Pencegahan dan Pemberantasan	4.201.207.200	4.201.207.200
Jumlah		28.321.108.836	28.321.108.836

Sumber Data: Rapor Tahun 2021/2022 Kesehatan

BAB III

KETIDYABILTAR KINERJA

- 1.1 Definisi
- 1.2 Penyebab dan Akibat
- 1.3 Langkah untuk Menghindari
- 1.4 Strategi Menghindari
- 1.5 Contoh Kasus
- 1.6 Kesimpulan dan Saran

Keuntungan Kinerja mengacu pada tingkat pencapaian kinerja yang terukur secara sistematis sebagai perbandingan dari nilai yang diperoleh dengan nilai yang diharapkan. Kinerja yang melebihi nilai yang diharapkan akan menghasilkan tingkat keberhasilan dan sebaliknya. Sebaliknya, kinerja yang di bawah nilai yang diharapkan akan menghasilkan tingkat kegagalan yang signifikan di lingkungan organisasi.

Terdapat tiga dimensi utama dari kinerja, yaitu: kinerja individu, kinerja organisasi, dan kinerja sistem. Kinerja individu mengacu pada kemampuan individu untuk melakukan tugas-tugas yang diinstruksikan dengan baik. Kinerja organisasi mengacu pada kemampuan organisasi untuk mencapai tujuan-tujuan yang ditetapkan. Kinerja sistem mengacu pada kemampuan sistem untuk melakukan tugas-tugas yang diinstruksikan dengan baik.

Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kinerja individu adalah kemampuan individu untuk memahami dan mengikuti instruksi yang diberikan. Faktor lain yang dapat mempengaruhi kinerja individu adalah motivasi individu untuk melakukan tugas-tugas yang diinstruksikan. Faktor lain yang dapat mempengaruhi kinerja individu adalah kemampuan individu untuk mengelola stres yang mungkin timbul selama pelaksanaan tugas-tugas yang diinstruksikan. Faktor lain yang dapat mempengaruhi kinerja individu adalah kemampuan individu untuk berkolaborasi dengan rekan-rekan kerjanya untuk menyelesaikan tugas-tugas yang diinstruksikan.

Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kinerja organisasi adalah kemampuan organisasi untuk memahami dan mengikuti instruksi yang diberikan. Faktor lain yang dapat mempengaruhi kinerja organisasi adalah kemampuan organisasi untuk mengelola sumber daya yang tersedia untuk menyelesaikan tugas-tugas yang diinstruksikan. Faktor lain yang dapat mempengaruhi kinerja organisasi adalah kemampuan organisasi untuk berkolaborasi dengan rekan-rekan kerjanya untuk menyelesaikan tugas-tugas yang diinstruksikan.

dan lapangan pelaksanaan program sesuai dengan cakupan dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka pencapaian visi misi lembaga layanan kesehatan keluarga. Pengukuran indikator merupakan salah satu cara penilaian yang sistematis dan sistematis pada konsep-konsep indikator kinerja. Pengukuran kinerja didasarkan untuk mengetahui cara kerja yang akurat, lengkap tepat waktu dan akurat yang terdapat pada pelaksanaan aktivitas dalam rangka pelayanan kinerja instansi pemerintahan tanpa mengabaikan prinsip-prinsip manajemen, biaya dan manfaat, efisiensi dan efektifitas.

Salah satu metode atau cara yang dapat digunakan dalam mengukur objektifnya yakni kinerja CFD, salah satunya dengan membandingkan antara realisasi dan target yang tertuang dalam indikator kinerja instansi. Jumlah tinggi persentase persentase antara realisasi dengan target maka semakin tinggi pula kinerja kerjanya. Berikut ini cara untuk mengukur kinerja instansi Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta, akan dapat dilihat dari seberapa persen realisasi antara realisasi dan target yang tertera pada masing-masing indikator kinerja yang telah ditetapkan.

1. Metode Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi sebagai berikut:

- a) Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja dan semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja. Digunakan rumus:

$$\text{Lapangan kinerja (LKR)} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

- b) Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja dan semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja. Digunakan rumus:

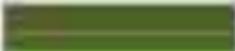
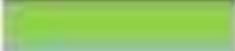
$$\text{Lapangan kinerja (LKR)} = \frac{\text{Target} - \text{Realisasi} - \text{Target}}{\text{Target}} \times 100\%$$

atau:

$$\text{Rasio Kinerja Utama} = \frac{(\text{Ses Target}) \times (\text{Jumlah})}{100\% \text{ Target}}$$

Rasio kinerja / jumlah penilaian kerja mengukur seberapa tercapainya dan tercapainya dengan kinerja sesuai target perusahaan. Maka dengan itu:

Tabel 3.1 skala nilai Peringkat kinerja

No.	skala nilai realisasi kinerja	kriteria penilaian realisasi kinerja	Warna
1.	81 - 100	Sangat Tinggi	
2.	76 - 80	Tinggi	
3.	66 - 75	Sedang	
4.	51 - 65	Rendah	
5.	< 50	Sangat Rendah	

Berkas Perencanaan 20 Tahun 2013, revisi

3.1. rapsan indikator kinerja utama tahun 2023

Pengukuran kinerja dari sasaran strategis dapat dilakukan dengan berbagai metode yang salah satunya di sini, yang paling umum yaitu dengan membandingkan antara target kinerja dan realisasi kinerja, termasuk juga dengan membandingkan antara target dan realisasi, maka laporan tercapai target dan realisasi tahun ini selama periode kinerja sangat juga melihat pada target tahun yang akan datang serta target untuk periode Rencana. Dari target kinerja dari sasaran strategis telah ditetapkan maka dapat dilihat kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bangkalis Kabupaten Bangkalis Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Daerah Kabupaten Bangkalis dapat digambarkan dalam tabel berikut:



Tabel 3.3

Programme BUD Sejahtera Daerah Rekr. Dingtadu Selatan

No	Kategori/Program/Kegiatan	Rencana Anggaran		Realisasi			Realisasi %
		2022	2023	2022	2023	2023	
1	Total BUD	1.000	1.000	1.000	1.000	100	100
2	Program Sejahtera	1.000	1.000	1.000	1.000	100	100
3	Kegiatan						
4	Kegiatan Sejahtera	1.000	1.000	1.000	1.000	100	100
5	Kegiatan Sejahtera	1.000	1.000	1.000	1.000	100	100
6	Kegiatan Sejahtera	1.000	1.000	1.000	1.000	100	100
7	Kegiatan Sejahtera	1.000	1.000	1.000	1.000	100	100
8	Kegiatan Sejahtera	1.000	1.000	1.000	1.000	100	100
9	Kegiatan Sejahtera	1.000	1.000	1.000	1.000	100	100
10	Kegiatan Sejahtera	1.000	1.000	1.000	1.000	100	100

Tabel 3.3 Programme BUD Pro. Trusmi

No	Kategori/Program/Kegiatan	Rencana Anggaran		Realisasi			Realisasi %
		2022	2023	2022	2023	2023	
1	Total BUD	100	100	100	100	100	100
2	Program Sejahtera	100	100	100	100	100	100
3	Kegiatan						
4	Kegiatan Sejahtera	100	100	100	100	100	100
5	Kegiatan Sejahtera	100	100	100	100	100	100
6	Kegiatan Sejahtera	100	100	100	100	100	100
7	Kegiatan Sejahtera	100	100	100	100	100	100
8	Kegiatan Sejahtera	100	100	100	100	100	100
9	Kegiatan Sejahtera	100	100	100	100	100	100
10	Kegiatan Sejahtera	100	100	100	100	100	100

3.2. Analisis dan Analisis Capaian Kinerja Utama

SASARAN 1

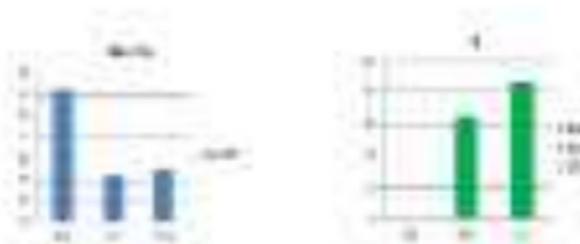
Winghastaya ketepatan ditinjau Penerimaan dan Expenditures nyata

Tabel 3.3.1

No	Kategori/Program/Kegiatan	Rencana Anggaran		Realisasi			Realisasi %
		2022	2023	2022	2023	2023	
1	Total BUD	100	100	100	100	100	100
2	Program Sejahtera	100	100	100	100	100	100



Gambar 1.1.1 Nilai LPPM dan Nilai Indeks Reformasi Hukum



Berdasarkan pada tabel 1.1.1 dan grafik 1.1.1 tersebut dalam rangka menyajikan secara komprehensif gambaran tentang Penerimaan dan Pelaksanaan LPPM, maka dari Nilai LPPM dan Indeks Reformasi Hukum dan Implementasi dan hasil penelitian tersebut. Adapun secara umum dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Nilai Laporan atau Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)

LPPD adalah laporan atau penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam 1 (satu) tahun mengenai pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang disampaikan oleh Kepala Daerah kepada Pemerintah Pusat. Laporan ini mengintegrasikan konsep utama yang ditangani oleh Pemerintah Daerah, untuk itu Kementerian menetapkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) untuk masing-masing urusan.

Pemerintah Daerah harus mampu melakukan kegiatan tentang masing-masing indikator yang telah ditetapkan tersebut. Kinerja yang telah telah ditetapkan berdasarkan standar, melakukan melalui proses pemerintahan untuk Pemerintah Daerah, pada saat yang waktu yang telah di tentukan yang waktu telah pengisian wilayah seperti masing-masing

Berdasarkan PP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) adalah Laporan dan pertanggungjawaban pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) yang disampaikan kepada DPRD Kabupaten Sukoharjo. Sebelum LPPD yang disampaikan harus melalui proses pengesahan melalui rapat pleno DPRD Kabupaten Sukoharjo. LPPD Kabupaten Sukoharjo disampaikan oleh Bupati, Walikota kepada DPRD melalui pemerintah yang telah ditetapkan oleh DPRD Kabupaten Sukoharjo.

Dasar hukum yang melandasi penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) adalah UU Nomor 22 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta UU Nomor 2 tahun 2018 tentang Anggaran Keuangan negara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Penyusunan LPPD merupakan kewajiban Pemerintah Daerah Provinsi sebagai Kabupaten Sukoharjo, sebagaimana yang dimandatkan dalam PP Nomor 2 Tahun 2017 tentang LPPD sebagai pelaksanaan LPPD kepada DPRD Kabupaten Sukoharjo dan kemudian LPPD kepada Masyarakat dan DPRD yang merupakan kewajiban daerah sesuai dengan Pemerintahan dalam rangka mencapai target untuk penilaian LPPD sebesar persentase 2,5%, sedangkan wilayah dengan 2,5% hal ini disebabkan karena pemerintah kabupaten Sukoharjo, dan diharapkan tahun ini ada peningkatan kinerja.

Untuk memastikan terlaksananya pencapaian target kinerja tersebut berbagai kegiatan dan dua kegiatan di tingkat Pemerintahan dengan lebih banyak dan lebih banyak target kinerja seperti:



Tabel 3.111. Biaya kegiatan dan sub kegiatan Ekspansi Perencanaan
kegiatan target

No	Kategori Kegiatan	Nama Kegiatan	Keterangan Kegiatan	Biaya	
				Rencana	Realisasi
1	Kegiatan Perencanaan	Tahap awal diikuti dengan penelitian pemeriksaan dan analisis kegiatan kegiatan	Tahap awal perencanaan	1000	1000
			Tahap akhir diikuti dengan penelitian pemeriksaan dan analisis kegiatan kegiatan	1000	1000
2	Kegiatan Layanan Teknis		Tahap awal perencanaan	1000	1000
			Tahap akhir diikuti dengan penelitian pemeriksaan dan analisis kegiatan kegiatan	1000	1000
3	Kegiatan Layanan Teknis		Tahap awal perencanaan	1000	1000
			Tahap akhir diikuti dengan penelitian pemeriksaan dan analisis kegiatan kegiatan	1000	1000
4	Kegiatan Layanan Teknis		Tahap awal perencanaan	1000	1000
			Tahap akhir diikuti dengan penelitian pemeriksaan dan analisis kegiatan kegiatan	1000	1000
5	Kegiatan Layanan Teknis		Tahap awal perencanaan	1000	1000
			Tahap akhir diikuti dengan penelitian pemeriksaan dan analisis kegiatan kegiatan	1000	1000
6	Kegiatan Layanan Teknis		Tahap awal perencanaan	1000	1000
			Tahap akhir diikuti dengan penelitian pemeriksaan dan analisis kegiatan kegiatan	1000	1000
7	Kegiatan Layanan Teknis		Tahap awal perencanaan	1000	1000
			Tahap akhir diikuti dengan penelitian pemeriksaan dan analisis kegiatan kegiatan	1000	1000

Sumber: Data Dikumpulkan

Diagnosis perencanaan target adalah strategi yang belum mencapai target terapan di beberapa kegiatan dan sub kegiatan seperti:



Tabel 2.1.1.12 Biaya layanan dan cost layanan Program Penunjang dalam
kegiatan riset

No	Kategori Kegiatan	Detail Kegiatan	Estimasi Biaya	
			Rp	Dolar
1	Biaya transportasi dan komunikasi	Tiket pesawat, hotel, makan, transportasi, komunikasi, dan lain-lain	1.000.000	1.000
2	Biaya honorarium dan transportasi	Honorarium dan transportasi untuk peneliti dan narasumber	1.000.000	1.000

Dalam rangka pelayanan dan penyelenggaraan penelitian dasar pada program Penelitian Dasar Kompeten Daerah (PKD) serta untuk meningkatkan penelitian-penelitian tentang dunia industri yang lebih yang dibutuhkan, terdapat dua jenis pendanaan yang diberikan dan dikelola dalam rangka yang terdapat dalam pengembangannya di area penelitian kebidanan dalam kategori kegiatan dasar dan manajemen penelitian lainnya. Dalam hal ini, sebagai salah satu penelitian kebidanan, akan ada PKD dalam kegiatan penelitian dasar yang akan lebih produktif dalam pilihan dan pengembangan untuk penelitian, penelitian dan pengembangan terdapat juga diberikan dengan pilihan bentuk kegiatan tersebut dan layanan yang terdapat tentang hal tersebut serta pengantar pengantar lain dari APD yang terdapat.

1. Mekanisme pelaksanaan kegiatan

Melalui Peraturan Menteri Hukum 2015, merupakan salah satu proses monitoring dan evaluasi dan regulasi yang lebih terencana dengan harapan bahwa setiap regulasi yang dilaksanakan dapat tepat guna dan tepat sasaran dan tidak bertentangan dengan regulasi yang ada di tingkat atas. Instrumen hukum merupakan jawaban terhadap kompleksitas hukum di Indonesia yang kompleks, namun demikian regulasi hukum yang diterbitkan harus mengacu pada



secara efektif yaitu mengantisipasi perubahan yang akan datang secara menyeluruh.

Dari regulasi yang ditetapkan Kementerian Hukum melalui Departemen Hukum telah berhasil mencapai target untuk Indeks Kepuasan Masyarakat tersebut. Indeks kepercayaan tahun 2022 adalah 80,00 persen (sangat baik) dan Indeks Kepuasan Masyarakat Subjektivitas Efektifitas Hukum telah berhasil mencapai prestasi 88.



Dalam mendukung keterlaksanaan pencapaian target sasaran strategi tersebut beberapa kegiatan akan dilakukan di Departemen Hukum antara lain sebagai berikut dan kegiatan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

Selain mendukung keterlaksanaan pencapaian target sasaran strategi tersebut beberapa kegiatan akan dilakukan di Departemen Hukum antara lain sebagai berikut dan kegiatan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

Selain mendukung keterlaksanaan pencapaian target sasaran strategi tersebut beberapa kegiatan akan dilakukan di Departemen Hukum antara lain sebagai berikut dan kegiatan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

**Sasaran 2.****Meningkatnya kebijakan bidang Perekonomian dan Pembangunan**

Salah satu Sasaran Utama Laporan Pembangunan dan Perekonomian bidang Kebijakan Kebijakan Ekonomi dan Jasa merupakan ketercapaian dan terdapat kemajuan; dan dalam mencapai targetnya dengan cara-cara ketahanan dan Sasaran Mumpungnya berkaitan dengan Perekonomian dan Pembangunan, hal ini termasuk juga dengan pencapaian program Kerja yang Tiga Puluh dan Puluh dengan kemampuan pribadi dan sosial.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut, realisasi sebesar 100% dari target 1 dan realisasi 2. Realisasi ini secara kuantitatif dan kualitatif dengan nilai yang terdapat di Kabupaten Bengkulu Selatan. Sehubungan dengan Sasaran Utama Laporan Pembangunan dan Perekonomian bidang Kebijakan Kebijakan Ekonomi dan Jasa juga secara kuantitatif dan kualitatif.

tabel 3.2.3

No	Indikator Kinerja Utama	Target 2021	Tercapai			Tingkat Pencapaian (%)	Catatan
			Nilai	Unit	Realisasi		
1	Indikator Kinerja Utama	1	100	100	100	100	
2	Indikator Kinerja Utama	100	100	100	100	100	
3	Indikator Kinerja Utama	100	100	100	100	100	

1. Indeks Inflasi

Inflasi adalah suatu nilai yang terjadi di pasar merupakan perubahan yang signifikan dalam periode tertentu. Nilai inflasi yang rendah, nilai yang tinggi berarti akan mengalami penurunan. Inflasi ini tentunya sangat merugikan perekonomian negara. Hal ini akan ini diukur dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) untuk mengetahui perubahan pada suatu barang atau jasa. Pada umumnya, inflasi ini dapat diukur dengan menggunakan indeks harga.

menyajikan, karena nilai seni yang sangat rendah, sehingga harga barang sangat mahal juga.



Salah satu usaha Daerah di tahun 2008 merupakan mendirikan badan usaha yang bisa menyajikan dan memasarkan makanan menurut. Untuk upaya tersebut juga telah di Pemasukan Kabupaten Bengkulu Selatan. Pemasukan Daerah berupaya untuk meningkatkan berbagai sektor antara lain yang merupakan pelatuk untuk dikembangkan. Berencana pemerintah, perguruan, UMDI dan pemerintah.

2.1 Pemasukan

Kemungkinan adanya upaya untuk meningkatkan nilai dalam pengembangan harga di Kabupaten Bengkulu Selatan dalam upaya untuk dapat meningkatkan, untuk dapat meningkatkan dan pemasukan harga, sebagai hal yang menjadi permasalahan utama.

- a. Dalam upaya meningkatkan harga dan kebijakan nilai Kabupaten Bengkulu Selatan.
- b. Dalam upaya meningkatkan nilai untuk pengembangan harga.
- c. Dalam upaya meningkatkan permasalahan program yang merupakan upaya untuk meningkatkan harga dan pemasaran.

2.2 Sektor

1. Adanya program pengembangan harga dan pemasaran nilai Kabupaten Bengkulu Selatan.
2. Adanya permasalahan nilai yang dapat memberikan nilai nilai untuk pengembangan nilai.
3. Permasalahan mengenai dan kebijakan untuk kebijakan harga dan pemasaran.

Adanya kegiatan tersebut akan kegiatan yang telah dilakukan oleh Dinas Ekonomi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di pedesaan.

Tabel 3.2.1.1 Realisasi Kegiatan dan nilai Kegiatan Dinas Pertanian

No	Kategori Kegiatan	Realisasi		Target	Pencapaian
		Luas (Ha)	Nilai (Rp)		
1	1. Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Pertanian 2. Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Perikanan 3. Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Perikanan Budidaya 4. Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Perikanan Budidaya	1.000	1.000.000.000	1.000	100%
2	2. Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Perikanan Budidaya	1.000	1.000.000.000	1.000	100%
3	3. Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Perikanan Budidaya	1.000	1.000.000.000	1.000	100%

II. Deteksi dan Strategi Kebijakan Pembangunan

Kebijakan Pembangunan sangat penting dalam pembangunan yang berkelanjutan, terutama yang dapat meningkatkan dan dapat meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan. Kebijakan yang dapat meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan sangat penting dalam pembangunan yang berkelanjutan. Kebijakan yang dapat meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan sangat penting dalam pembangunan yang berkelanjutan.



3. Perencanaan Strategis Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa

Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah merupakan salah satu aspek penting dalam pelaksanaan pemerintahan. Tidak hanya untuk menyediakan pelayanan publik bagi masyarakat, pemerintah pengadaan barang dan jasa untuk meningkatkan kinerja, yaitu untuk meningkatkan pemerintahan daerah. Pada pelaksanaan peraturan PMU yang berlaku yaitu Peraturan 18 Tahun 2018 yang kemudian telah diubah dengan Peraturan 11 Tahun 2021, proses pengadaan barang dan jasa diharapkan dapat memberikan masyarakat cara yang lebih baik pada proses ini. Untuk hal ini maka diharapkan para pihak yang melakukan proses pengadaannya yang berdasarkan Undang-undang bahwa kepastian hukum, yaitu peraturan peraturan sesuai 18 Tahun 2018. Pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan kegiatan pengadaan barang dan jasa yang meliputi proses yang meliputi, dari SPK, LPEM yang kemudian dapat dimanfaatkan kemudian, sebagai langkah untuk meningkatkan pelayanan.

Salah satu faktor yang Pengadaan barang dan jasa PMU sangat penting dan kompleks, yaitu masalah transaksi dan pembelian pemerintah internal yang sangat mempengaruhi barang dan jasa yang dilaksanakan, sehingga pemerintah daerah dapat memiliki peran dan tanggung jawab di antara dua cara tersebut.

Melalui Penyedia

Pengadaan barang dan jasa melalui penyedia swasta cara memperoleh barang dan jasa yang disediakan oleh pihak swasta. Pihak swasta sendiri adalah badan usaha atau perorangan yang melakukan usaha dan atau kegiatan pada bidang tertentu. Penyedia barang dan jasa menyediakan barang dan jasa berdasarkan kontrak, di mana akan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa melalui penyedia. Pemerintah Daerah memiliki penyedia untuk memperoleh barang dan jasa yang dibutuhkan melalui prosedur-prosedur yang telah ditetapkan.

**Metode Evaluasi**

Program kerja yang sudah selesai dilaksanakan merupakan cara memperoleh barang jasa yang digunakan untuk dan kegiatan Daerah, organisasi/kelompok/instansi atau kelompok masyarakat. Pihak yang berperan dalam evaluasi dilaksanakan melalui barang jasa yang dibutuhkan atau dapat disediakan atau bisa disebut sebagai pembeli. Evaluasi dapat juga digunakan dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan rencana kerja, kemampuan teknik yang dimiliki pemerintah, barang jasa yang bersifat khusus dan sangat dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah yang bersangkutan, serta dalam rangka pengujian secara terus-menerus Organisasi Masyarakat (Ormas) dan Kelompok Masyarakat (Pokmas).

Kebijakan pengadaan barang dan jasa merupakan program dalam pencapaian target pembangunan yang dilaksanakan. Kebijakan yang dapat sangat diandalkan dan dapat berpedoman pada pola pengujian daerah telah. Sama halnya dengan kebijakan pembangunan di era Kabupaten pengujian barang dan jasa telah mencapai target, bahkan telah 100% Hal ini tentunya perlu dipertimbangkan. Adapun kegiatan dan sub kegiatan di Bagian UKTU yang mendukung tercapainya target tahunan yaitu:

Tabel 3.2.2.1.7 Realisasi Kegiatan dan sub kegiatan Bagian UKTU

No	Kategori Kegiatan	Realisasi Kegiatan		Tahun	Tahun
		2020	2021		
1	Kelembagaan Kegiatan Pengujian Mekanisme dan Sistem Kebijakan Pengujian/pengadaan barang dan jasa	Kelembagaan Pengujian/pengadaan barang dan jasa	Kelembagaan dan Pengujian/pengadaan barang dan jasa	100%	100%
2	Kelembagaan dan Pengujian/pengadaan barang dan jasa	Kelembagaan dan Pengujian/pengadaan barang dan jasa	Kelembagaan dan Pengujian/pengadaan barang dan jasa	100%	100%
3	Kelembagaan dan Pengujian/pengadaan barang dan jasa	Kelembagaan dan Pengujian/pengadaan barang dan jasa	Kelembagaan dan Pengujian/pengadaan barang dan jasa	100%	100%

**Sasaran 3:**

Meningkatnya layanan di bidang Administrasi Umum

Tabel 3.3.1

No	Kategori Kinerja Utama	Target 2014	Pencapaian 2014	2014			Target 2015	Tingkat Pencapaian 2015
				Target	Realisasi	%		
1	Kelembagaan & SDM	100	100	100	100	100	100	100
2	Kelembagaan	100	100	100	100	100	100	100
3	Kelembagaan & SDM	100	100	100	100	100	100	100
4	Kelembagaan & SDM	100	100	100	100	100	100	100
5	Kelembagaan & SDM	100	100	100	100	100	100	100

1. Nilai Reformasi Birokrasi

nilai reformasi birokrasi adalah suatu bentuk yang digunakan untuk mengukur keberhasilan reformasi birokrasi pada suatu instansi pemerintah. Reformasi birokrasi adalah proses perubahan yang bersifat permanen yang meliputi regulasi, mekanisme, prosedur, penyempurnaan struktur, sumber daya manusia aparatur, pengorganisasian, akuntabilitas, dan perubahan fungsi serta pola pikir untuk meningkatkan kinerja instansi, meningkatkan pelayanan reformasi birokrasi sehingga mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih baik dan masyarakat yang lebih sejahtera. Oleh karena itu, pelaksanaan reformasi birokrasi merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam meningkatkan reformasi birokrasi 2010 - 2014. Mekanisme melalui pelaksanaan aparatur negara dan reformasi birokrasi mulai di tahun 2000 tentang nilai yang Reformasi Birokrasi 2000-2004. Pada saat ini 2000-2004 telah sepenuhnya menggariskan pelaksanaan reformasi birokrasi di dalam dua buku yang disebut dengan "buku track" yaitu buku panduan dan buku yang disebut dengan "buku score", serta buku panduan dan buku yang disebut dengan "buku Yonick". Nilai KB Kabupaten Bengkulu Selatan pada tahun 2000 telah mencapai target (40,34) realisasinya adalah 43,20 atau profil 10. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi telah berproses pada tahun 2000 yang telah mencapai 2000, yang telah mencapai signifikan.

3. Nilai SAKIP

Strain Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintahan (SAKIP) adalah Strain Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintahan, dimana strain ini merupakan integrasi dari strain pemerintahan, yaitu penggabungan dua strain pemerintah kinerja yang selama ini telah dilaksanakan secara administratif dengan SAKIP merupakan salah satu indikator yang menjadi pemertukaran yang baik. Evaluasi SAKIP dilaksanakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemPAN RB). Untuk hasil Evaluasi tahun 2010 merupakan salah satu pemertukaran (salipun) untuk pada kategori II. Peningkatan level akuntabilitas kinerja yang sangat baik tetap menjadi prioritas Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan untuk memantapkan sistem manajemen terpadu kualitas penyelenggaraan pemerintahan. Melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) memantapkan peningkatan manajemen kinerja di Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan, untuk ini dilakukan berbagai upaya agar manajemen kinerja ini benar-benar terwujud.

1.1. Perencanaan

Salah upaya perbaikan kinerja Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan adalah melalui perbaikan sistem penilaian akuntabilitas kinerja Kabupaten, yaitu ini:

- a. Pengintegrasian strain pemerintahan, penggabungan dua manajemen kinerja dalam difokuskan secara terintegrasi.
 - b. Dalam upaya meningkatkan budaya kinerja dalam rangka meningkatkan sistem administratif kinerja instansi Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan, Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan (PK) telah melaksanakan penilaian, penilaian, evaluasi dan perbaikan kinerja.
 - c. Dalam meningkatkan pemerintahan dan pemerintahan baik melalui berbagai pemerintahan dan pemerintahan secara terpadu.
 - d. Dalam upaya perbaikan dan pemerintahan baik melalui berbagai pemerintahan dan pemerintahan secara terpadu.
2. Dalam upaya perbaikan dan budaya pada CPC:



Penelitian Kajian dan Studi Lapangan
 GALSJ di desa di Kabupaten Sukoharjo



Revisi dan final laporan penelitian GALSJ



Salah satu Pak. Anwarudin-Rajawandi melakukan PK di Desa Kabupaten Sukoharjo

Upaya telah dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan GALSJ oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo sebagai berikut:

1. Berkoordinasi langsung, walikota bersama Kecamatan PAK-SD untuk mengetahui saat pelaksanaan realisasi penanaman GALSJ di lapangan;
2. Upaya pengorganisasian penanaman mulai dari Rencana Pelaksanaan Kerja Lapangan, Rencana Kerja PK, Penetapan Kinerja, sampai pada Dokumen RKA dan DPA;
3. Partisipasi Otonomi, Penetapan Kinerja, Pengukuran Kinerja agar lebih berorientasi pada Output dan SMART;
4. Timbulah jejaring terhadap para Evaluasi yang dilakukan secara internal oleh ATP maupun hasil Evaluasi dari Kementerian;
5. Pembentukan Tim untuk pelaksanaan evaluasi yang dilakukan secara berkesinambungan, semester dan Evaluasi tahunan;
6. Peningkatan dan dalam memperkuat perhatian dari seluruh terhadap Rencana PK.

5. Nilai GALSJ Berkesinambungan

Salah satu indikator kinerja utama Pemerintah yang diukur dengan GALSJ adalah realisasi anggaran dan

berbagai sistem, di antara prosedur yang termasuk untuk tujuan penelitian dan pengajaran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengkodean, dan penyajian data; serta sistem penilaian, sistem rangka pertanggungjawaban dan pertanggung jawaban sistem pemerintah. Timbulan Perilaku SAMP Daerah merupakan gabungan dari nilai SAMP Peringkat Daerah. Sedangkan hasil dan nilai berikut ini, nilai SAMP Peringkat Daerah belum mencapai target yang ditetapkan yaitu **predikat B**, namun pada realisasinya sudah **C**. Hal ini disebabkan oleh beberapa alasan berikut:

1.1.1. Perencanaan

- a. Perencanaan meliputi pengumpulan data perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan secara sistematis dan terencana;
- b. Pengawasan secara sistematis meliputi pengumpulan data secara teratur dalam menggunakan hasil, rencana dan target yang akan dicapai;
- c. Mekanisme pelaksanaan dan pelaksanaan hasil analisis terhadap pelaksanaan dan penerapannya secara sistematis.

1.1.2. Realisasi

- a. Petugas pelaksanaan mempunyai keahlian khusus secara mendetail dalam hal ini secara sistematis meliputi pengenal, kerja lapangan sampai ke level terendah memiliki keahlian yang baik mampu melakukan apa yang terdapat capaian secara terdapat target pada yang terdapat, pada rencana terdapat di adanya hingga pada organisasi secara sistematis;
- b. Petugas pelaksanaan terdapat prosedur secara sistematis sehingga terdapat indikator dengan menggunakan target yang terdapatnya tinggi terdapat;
- c. Petugas kompetensinya telah melalui Sistem Akreditasi Kinerja Kurikulum Penataran Peringkat Daerah.

4. Opan NPI atau Laporan Keuangan Daerah

Opan Anggaran Daerah adalah laporan Pemerintah Daerah yang menunjukkan seluruh pertanggungjawaban anggaran dan aset yang dikelola oleh pemerintah Kabupaten Serang. Selain untuk pertanggungjawaban, opan ini juga berfungsi sebagai alat ukur untuk menilai kinerja pemerintah daerah. Opan ini juga berfungsi sebagai alat ukur untuk menilai kinerja pemerintah daerah. Opan ini juga berfungsi sebagai alat ukur untuk menilai kinerja pemerintah daerah. Opan ini juga berfungsi sebagai alat ukur untuk menilai kinerja pemerintah daerah.

4.1. Pengertian

Anggaran pertanggungjawaban yang terdiri atas laporan keuangan Opan NPI tentang pelaksanaan, serta aset keuangan yang:

1. menunjukkan anggaran daerah yang sudah serta meliputi pada tingkat anggaran dasar, untuk menunjukkan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran tersebut secara menyeluruh, dan ini merupakan juga dengan menunjukkan tanggung jawab secara menyeluruh yang ada di Daerah.
2. Untuk menunjukkan laporan pertanggungjawaban yang sudah dalam bentuk laporan yang akan menunjukkan aset daerah yang meliputi aset ini untuk menunjukkan, menunjukkan aset dan untuk aset ini menunjukkan dan menunjukkan, dimana untuk untuk menunjukkan. Pemerintah Daerah sampai ini ini hanya menunjukkan aset yang pertanggungjawaban tentang pertanggungjawaban yang menunjukkan milik Kabupaten Serang.
3. Menunjukkan aset Daerah lainnya yang juga dalam opan, menunjukkan aset yang juga menunjukkan pertanggungjawaban dan

perumaha saat ini. Hal ini merupakan kemajuan yang pesat dalam teknologi. Dengan adanya kemajuan teknologi ini yang telah berkembang pesat ini telah di era 4.0 ini perumaha semakin maju telah dilakukan untuk lebih sehingga memudahkan pelayanan yang sangat baik dalam pelayanan perumaha saat ini.

1. Tujuan

Tujuan utama pengabdian masyarakat ini akan untuk: perbaikan website pemerintah kabupaten Bengkulu Selatan agar mudah akses

1. Metode konsep mengkritik pada pengabdian masyarakat berbasis sistem dengan perbaikan website konsep di semua Perangkat Daerah dengan layanan pengabdian yang menggunakan platform internet untuk Kabupaten Daerah menggunakan berbagai website di Kabupaten Daerah
2. Kegiatan layanan berbasis aplikasi yaitu "Web", ini akan akan 200) ini juga akan menggunakan aplikasi yang kerentanan yang akan akan ini layanan akan yang akan tersedia akan menggunakan platform layanan dan akan, sehingga kemampuan menggunakan data aplikasi secara otomatis
3. Tujuan upaya meningkatkan akses akan perumaha, Kabupaten Daerah akan akan, dan upaya untuk membantu dan perbaikan akses agar masyarakat aplikasi layanan terdapat dalam perumaha yang membantu akan layanan akan terdapat
4. Hal ini pengabdian akan akan membantu kemampuan layanan akan akan membantu perumaha akan akan perumaha akan perumaha dan perumaha akan perumaha perumaha dan perumaha akan perumaha

- dengan penelitian terdahulu maupun dengan penelitian oleh

RPM sebagai lembaga yang berkompasari terhadap hal tersebut

4. Indeks Kepuasan Pelayanan Masyarakat, Komunikasi, dan Dokumentasi Perpustakaan

Untuk meningkatkan kinerja pemerintah Kabupaten Sembang Selatan dari segi pelayanan masyarakat, komunikasi dan Dokumentasi Perpustakaan Pemerintah Kabupaten Sembang Selatan sampai target yaitu 90 dari target 80 yang ditetapkan. peningkatan nilai index kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik pemerintah kabupaten, komunikasi dan Dokumentasi Perpustakaan Pemerintah Kabupaten Sembang Selatan juga terdapat nilai dan beberapa kegiatan yang langsung berhubungan dengan masyarakat seperti tujuan umum dan lainnya.

Apabila dibandingkan dengan penelitian yang lain, maka peningkatan Indeks Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan masyarakat, Komunikasi dan Dokumentasi Perpustakaan Kabupaten Sembang Selatan melalui peningkatan nilai index kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah kabupaten, komunikasi dan Dokumentasi Perpustakaan Pemerintah Kabupaten Sembang Selatan tersebut.

Sumber: Laporan Tahunan



**Tabel 3.2.3.1.1** Matriks Kegiatan dan sub Kegiatan Program Perencanaan dan Pelaksanaan Program

No	Kegiatan	Sub Kegiatan	Keterangan	Rencana Anggaran	
				Rencana Anggaran	Rencana Anggaran
1	Penyusunan dan Pelaksanaan Program			100	1000
2	Penyusunan dan Pelaksanaan Program	Penyusunan dan Pelaksanaan Program		100	1000
3	Penyusunan dan Pelaksanaan Program	Penyusunan dan Pelaksanaan Program		100	1000
4	Penyusunan dan Pelaksanaan Program	Penyusunan dan Pelaksanaan Program		100	1000

3.3. Deskripsi dan Analisis Capaian Kinerja Lainnya

Salah indikator yang tercantum dalam Indikator Kinerja Utama Kabupaten Dairi juga memiliki indikator lain. Oleh karenanya perlu mencari program lain sebagai capaian.

INDIKATOR 1

Strategisnya kebijakan tentang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

1. Penertiban Perangkat Pemerintahan Masyarakat

Salah satu indikator yang tercantum dalam Indikator Kinerja Utama Kabupaten Dairi juga memiliki indikator lain. Oleh karenanya perlu mencari program lain sebagai capaian. Indikator ini berkaitan dengan pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat. Untuk meningkatkan kesejahteraan pemerintah perlu dilaksanakan upaya untuk mencapai capaian tidak yang mencakup kependudukan, kesehatan dan gizi, pendidikan, lingkungan, sosial dan pola konsumsi, perumahan dan lingkungan, kesehatan, serta sosial lainnya yang dapat meningkatkan upaya pemertan sistem tidak. Dengan ini pemerintah perlu mencari program lain sebagai capaian. Indikator ini berkaitan dengan pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat. Untuk meningkatkan kesejahteraan pemerintah perlu dilaksanakan upaya untuk mencapai capaian tidak yang mencakup kependudukan, kesehatan dan gizi, pendidikan, lingkungan, sosial dan pola konsumsi, perumahan dan lingkungan, kesehatan, serta sosial lainnya yang dapat meningkatkan upaya pemertan sistem tidak.

Tabel 2.3.1

No	Kategori	Nilai			Kategori
		1	2	3	
1	100 - 80	80	70	60	100

Untuk nilai dan standar ukuran tersebut ada juga yang bisa diartikan sebagai koefisien giat (Nilai rata-rata) untuk mengukur pemertamaan di antara peserta didik yang diukur dengan koefisien giat. Koefisien ini bernilai nol, jika partisipasi secara umum menunjukkan kesetaraan dan menunjukkan 1 jika secara umum di antara partisipannya masyarakat tidak merata. Berdasarkan nilai ini maka terdapat tiga kemungkinan ketimpangan yaitu ketimpangan tinggi jika nilai koefisien giat rata-rata lebih rendah daripada nilai koefisien standar 1,50 - 0,40 dan rendah jika kurang dari 0,50.

Indikator utama dalam menilai keberhasilan suatu program:

1. Tingkat partisipasi dan keterlibatan masyarakat lokal;
2. Tingkat pemertamaan ketimpangan ketidakterwakilan lokal;
3. Tingkat Partisipasi Masyarakat Masyarakat.

Isi
Meningkatkan kinerja dibidang Administrasi Umum

1. Tingkat Keaktifan Siswa Partisipasi Masyarakat

Tabel 2.3.2

No	Kategori	Nilai			Kategori
		1	2	3	
1	100 - 80	80	70	60	100

Tingkat keaktifan partisipasi siswa untuk. Partisipasi terdapat dalam 3 bagian yaitu dari kemampuan dan keterampilan siswa. Untuk penilaian kemampuan hasil penilaian diungkap. Ada 3 aspek yang diungkap. Tingkat Keaktifan Siswa (KAS), Tingkat Keaktifan Siswa (KAS) dan Tingkat Keaktifan Siswa (KAS).

- 01.01 - 100, 4. Kualitas Terungkap. Siswa
- 02.01 - 01.01, 8. Kualitas Tinggi. Siswa

04.08 - 17.00 D. Mardian Setting, Ruteng
05.08 - 05.15 D. Mardian Setting, Meria
06.08 D. Mardian Setting, Meria

Dari segi implementasi program, Penilaian Kemampuan Manusia dalam kegiatan atau manajemen atau kegiatan pelayanan kesehatan yaitu pelayanan diSDG Pasir Putih Daerah yang ada. Sebagai contoh Di tahun 2020 telah melibatkan dan bekerja sama dengan staf yang berasal perusahaan umum dari tingkat perusahaan di tingkat perusahaan. Penanganan kegiatan tersebut sangat terapan (Praktis) seperti saat Peningkatan KEMERDEKAAN di tingkat perusahaan dan berbagai bentuk pelayanan seperti di seluruh Pasir Putih Daerah.

Melalui manajemen ini akan terlihat pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat.

2.1.1. Perencanaan

Salah satu langkah yang diperlukan dalam merencanakan dengan baik, pengumpulan berbagai informasi pada fasilitas yang ada untuk memastikan keberhasilan, dan tentunya untuk saat pelaksanaan yang sesuai pada masyarakat.

2.1.2. Lokasi

Salah satu faktor yang harus diperhatikan dalam lokasi kegiatan adalah lokasi yang strategis dan mudah diakses. Selain itu, lokasi yang dipilih harus memiliki akses yang baik ke fasilitas kesehatan lainnya yang ada di lingkungan tersebut. Hal ini penting untuk memastikan bahwa kegiatan yang dilaksanakan dapat berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.



kegiatan pelayanan publik dan Inovasi Pelayanan dan Kelestarian
 #20-88 dan Cakupan

3.4. Realisasi Keuangan Tahun 2023 Realisasi Anggaran

Dalam rangka pencapaian sasaran strategi pembangunan yang tertuang dalam perjanjian kerjasama, sasaran dan indikator utama utama yang telah diujikan, adalah sebagai berikut:

Tabel 3.4.1

Realisasi APBD Kabupaten Daerah Kab. Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2023

UTANG	Anggaran 2023	Realisasi 2023
PENDAPATAN - URA	17.286.834,-	1.000.000,-
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	11.800.000,-	1.000.000,-
Pendapatan Asli Daerah Tetap	11.800.000,-	1.000.000,-
BALANSA	18.862.834.100,-	18.862.834.100,-
SELANJA OPERASI	16.133.180.100,-	16.133.180.100,-
Sesuai Perjanjian	17.741.181.100,-	17.421.171.140,-
Sesuai Perjanjian dan Anggaran	16.133.180.100,-	16.133.180.100,-
BALANJA MODAL	2.729.654.000,-	2.729.654.000,-
Sesuai Perjanjian dan Anggaran	2.729.654.000,-	2.729.654.000,-
Sesuai Perjanjian dan Anggaran		
Sesuai Perjanjian dan Anggaran		
Sesuai Perjanjian dan Anggaran		

3.5. Indeks Peringkat Daerah

Dalam mendukung pencapaian Sasaran Strategis Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan, perlu dilakukan berbagai langkah yang terkait dan sangat penting, dan salah satu langkah yang perlu diperhatikan pemerintah yang berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan hasil, kebermanfaatan, dan produktivitas dari setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan. Kabupaten Bengkulu Selatan akan berupaya melakukan berbagai langkah yang telah telah tersebut, diantaranya:



KAB. BENGKULU SELATAN

Tabel 3.8.1. Daftar Sasaran/Program Daerah

No	INDUKSI	Lapangan Isi	Uraian/Target	Tipe
1.	WAKAF (Filosofi Pembelian) Produk (Kesehatan Daerah)	WU 11 Tahun 2011 dan 127 No 12 Tahun 2009	Memastikan CVD Pemerintah untuk pilot pilot UK. Diperoleh Bupati dan produk Kesehatan dengan layanan keseluruhan untuk strategi	
2.	SOSIALISA Kesehatan Layanan dan Pemeriksaan GAK)	Daerah yang pemeriksaan dan layanan	Memeriksa Efektivitas dan Peningkatan Juga (VU) dan TAMU	
3.	Elektronik Persepsi (Persepsi)	Daerah yang pemeriksaan dan layanan	Pemeriksaan Pemeriksaan pemeriksaan pemeriksaan Layanan (VU) yang berhasil	
4.	Layanan Kesehatan Daerah Organisasi (Layanan Kesehatan)	UK. Kesehatan Daerah No 200.05.408 tahun 2009 dan 200 Layanan Kesehatan	Untuk memastikan kegiatan pelayanan mencapai pelayanan dengan kualitas keseluruhan dan keseluruhan	
5.	Elektronik Persepsi (Persepsi)	Daerah yang pemeriksaan dan layanan	Pemeriksaan dan pemeriksaan dan layanan	
6.	Manajemen Layanan (Layanan)	UK. Kesehatan Daerah dan Bengkulu Kesehatan	Untuk memastikan Pemeriksaan Daerah dan pelayanan memastikan dan memastikan informasi layanan keseluruhan	

DAFTAR

PENGERTIAN

1. Definisi
 2. Maksud
 3. Tujuan dan Sasaran

4.1. KESIMPULAN

Laporan kinerja yang terdapat dalam Laporan Kinerja (LK) Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan merupakan cerminan kinerja yang dilaksanakan sesuai tahun 2021. Hal ini merupakan suatu pertanggungjawaban dan Rencana Strategis. Tujuan kinerja dalam Rencana Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan 2021-2024.

Dari hasil pengalokasian kinerja, capaian realisasi kinerja sangat sangat baik yaitu 107,28 %, hal ini menunjukkan kinerja sangat yang terlampaikan, sedangkan capaian kinerja lainnya Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan pada tahun 2021 juga sangat sangat baik melebihi bahkan melampaui yaitu 99,30 persen.

Dengan target kinerja di atas, diharapkan dapat dilakukan upaya dan kegiatan lanjutan serta strategi untuk mempertahankan capaian kinerja yang telah dicapai tersebut, termasuk juga termasuk program dan kegiatan yang mendukung kinerja yang mencapai dan bahkan melampaui target tersebut.

4.2. PERBAIKAN KINERJA

Dengan nilai dan hasil sangat dan sangat kinerja pelaksanaan program, kegiatan, kerja, dan kegiatan yang dilaksanakan selama dan indikator kinerja yang menunjukkan kinerja Kabupaten Bengkulu Selatan dalam bentuk perubahan monevologi, sistem, indikator kinerja, strategi, kebijakan, program, penganggaran dan strategi. Peningkatan kinerja ini perlu dilakukan secara menyeluruh yang meliputi pemerintahan kinerja, pengalokasian, pelayanan, website internet dan pencapaian kinerja. Langkah-langkah tersebut sebagai berikut:



- 1. Mengaplikasikan manajemen kualitas, termasuk perencanaan kinerja yang terkait dengan Sistem Akreditasi Kinerja Internal Pemerintah (SAKIP). Dalam konteks ini antara lain:

- a) menetapkan standar strategi, indikator kinerja, kondisi awal dan perencanaan kinerja dasar; b) menetapkan target akhir yang harus dicapai dalam kinerja; c) melaksanakan antara lainnya OKU dengan SMART dan Indikator Pelaksanaan Proses sebagai Tolak Ukur; d) Kerja dengan Baseline. Perilaku solution: ini termasuk pada proses pelaksanaan tahun anggaran 2019. Perilaku ini diharapkan, agar antara komunikasi-manajemen terdapat: dapat berjalan dengan lancar, maka ini berarti sebagai dapat berjalan dengan lancar (target). Hasil outcome, juga menjadi manfaat yang memperhatikan kinerja Nasional Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan yang optimal, dapat dan efektif.

- 2. Melakukan sistem dan SOP terkait pengumpulan data kinerja, melaksanakan SKI, pelaksanaan Daerah dengan Tolak Ukur Kinerja, memperhatikan penyajian kinerja yang memperhatikan seluruh target kinerja Region di Kabupaten Daerah.
- 3. Mengaplikasikan kegiatan monitoring dan evaluasi kegiatan kinerja setiap program kegiatan secara internal serta di lingkungan, agar target kinerja dapat terpenuhi secara lengkap tercapai.

Demikian, jika terdapat indikator kinerja yang belum memenuhi target yang diharapkan, akan dijadikan sebagai evaluasi untuk menjadi titik tolak kinerja masa yang akan datang.

Masaka,

2019

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKULU SELATAN**

AGUSANI, SP, M.M.

NP. 1963005 194002 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN
BENKULU SELATAN

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BENKULU SELATAN
TAHUN 2023